

STUDI TENTANG DINAMIKA PANCASILA DARI MASA KE MASA

Badriyatus Salma¹⁾, Syavina Damar Rosi²⁾, Zhafirah Khatir³⁾, Riska Andi Fitriono⁴⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta

⁴⁾Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail: badriyatussalma@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa, dinamika Pancasila penting untuk dikaji dan diketahui bersama. Untuk itu penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui bagaimana dinamika pancasila dari masa ke masa, dengan harapan berbagai peristiwa yang telah terjadi mampu dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi bersama. Penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif dengan metode studi pustaka melalui berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak awal dirumuskan hingga ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila telah mengalami berbagai tantangan, hambatan, dan ancaman dalam mempertahankan maupun pengamalan nilai-nilai nya. Di era orde lama dan orde baru Pancasila masih digunakan sebagai alat kekuasaan sehingga dalam implementasinya, berbagai kebijakan pemerintah banyak yang ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Menginjak era reformasi, akibat perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat dan bebas, semakin banyak tantangan dan ancaman terhadap ideologi negara yang masuk tanpa disadari.

Kata Kunci : Dinamika, Pancasila, Ideologi

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai ideologi negara telah mengalami dinamika yang begitu panjang. Sejarah Pancasila bahkan telah dimulai sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara tidaklah mudah mengingat luasnya negara Indonesia dan kondisi masyarakatnya yang begitu beragam. Melalui berbagai pertimbangan dari tokoh-tokoh pendiri negara, Pancasila disusun sedemikian rupa agar sesuai dengan nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa. Hal inilah yang membuat Pancasila akhirnya layak untuk digunakan sebagai acuan dan pedoman dasar dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku oleh setiap elemen masyarakat Indonesia sampai kapan pun.

Akan tetapi, pada kenyataannya pengamalan nilai-nilai Pancasila tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dari masa ke masa, kerap kali terjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila baik dalam tubuh birokrasi maupun masyarakat sipil. Di era awal kemerdekaan, penerapan Pancasila masih diwarnai dengan berbagai pemberontakan oleh pihak-pihak yang menolak ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurut pandangan mereka, ada ideologi lain yang dianggap lebih cocok diterapkan, sehingga upaya perlawanan banyak bermunculan. Menginjak ke era orde lama, pengingkaran nilai-nilai Pancasila terlihat jelas dalam tubuh pemerintahan. Ideologi Pancasila yang semestinya dijalankan secara murni justru mulai terpengaruh oleh ideologi-ideologi lain yang tak sejalan dengan nilai luhur bangsa. Upaya penggantian Pancasila pun muncul dari antek-antek komunis yang sempat

menggelisahkan rakyat cukup lama. Di era orde baru dengan sistem pemerintahan dan pemimpin yang baru, awalnya menjadi harapan baru terwujudnya Pemerintahan yang mampu menjalankan dan mempertahankan nilai luhur Pancasila dari gempuran ideologi yang merusak moral bangsa. Namun kenyataannya, di masa ini pun keberjalanan Pancasila belum mampu dikatakan sesuai harapan. Hingga tahun 1998 saat kondisi Indonesia semakin kacau, para tokoh reformasi yang digerakkan kaum-kaum muda dan terpelajar menjadi awal baru sejarah reformasi di Indonesia. Namun, terjadinya pembaharuan di berbagai sektor tersebut, tidak menghilangkan datangnya berbagai ancaman terhadap ideologi bangsa. Justru berbagai bentuk ancaman baru muncul dari dalam dan luar dan sering kali tidak disadari.

Oleh karena itu, generasi muda tidak boleh menutup mata dan melupakan sejarah perkembangan dasar negara Indonesia. Berbagai dinamika yang dilalui Pancasila dari masa ke masa penting untuk diketahui dan dipelajari bersama. Kesadaran untuk turut mempertahankan ideologi bangsa harus selalu ditumbuhkan dalam setiap jiwa pemuda. Dengan harapan, segala bentuk peristiwa yang mengancam keberadaan ideologi Pancasila tidak terulang kembali dan munculnya ancaman-ancaman baru mampu disadari dan diantisipasi sedini mungkin.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Proses pengkajian dilakukan melalui studi pustaka dari berbagai sumber-sumber penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sumber rujukan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku pancasila dan kewarganegaraan, dan beberapa literatur pancasila yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN

Dinamika Pancasila Masa Awal Kemerdekaan

Kemunculan Pancasila dikatakan sudah ada sejak Indonesia belum merdeka dan Pancasila adalah pedoman bagi bangsa Indonesia ketika ingin menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 atau lebih tepatnya satu hari setelah hari proklamasi kemerdekaan.

Sebagai negara yang baru merdeka, tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan cara menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tantangan kali ini berawal dari adanya masyarakat yang tidak setuju dengan gagasan tersebut sehingga timbul sejumlah upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Alhasil, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bertindak nekat untuk mempertahankan Pancasila pada saat itu.

Tahun 1945 – 1950

Pada tahun ini, terjadi aksi-aksi pemberontakan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Aksi-aksi tersebut antara lain:

1. Pemberontakan PKI

Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 adalah salah satu kisah terkelam yang terjadi di Indonesia. Pemberontakan tersebut bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, menggantikan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Komunis, meruntuhkan Kabinet Moh. Hatta (Rekonstruksi dan Rekonsiliasi

(RERA)) dan menjadikan Muso serta Arif Syarifudin sebagai Presiden dan Perdana Menteri. Akan tetapi, aksi ini akhirnya bisa digagalkan.

2. Pemberontakan DI/TII

Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo terjadi pada tanggal 17 Agustus 1949. Pemberontakan yang ditandai dengan didirikannya sebuah Negara Islam Indonesia (NII) memiliki tujuan antara lain:

- a) Membentuk Negara Islam Indonesia atau NII secara berdaulat dan diakui oleh negara lain serta hukum internasional, baik secara de jure maupun de facto.
- b) Menjadikan Indonesia sebagai negara dengan dasar negara syariat Islam.
- c) Menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara Indonesia.
- d) Mengubah Undang-Undang dan Konstitusi yang sudah ada agar berbasis syariat Islam.
- e) Menolak ideologi dan hukum lain selain dari Alquran dan juga Hadist, selain itu berarti ideologi kafir dan tidak boleh diikuti.

Pemberontakan DI/TII merupakan pemberontakan yang sangat membekas bagi bangsa Indonesia kala itu, karena gerakan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan menimbulkan banyak korban jiwa. Akan tetapi, akhirnya Kartosuwiryo bersama para komplotannya berhasil ditangkap pada 4 Juni 1962.

3. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Pemberontakan yang dipelopori oleh Raymon Westerling memiliki tujuan utama untuk memperkuat RIS dan meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Dan berharap serangan Westerling dapat menggoyahkan Indonesia sehingga Indonesia lemah dalam bernegosiasi dengan Belanda.

Sedangkan dalam kehidupan berpolitik, penerapan sistem yang dipakai lebih diarahkan pada sistem demokrasi parlementer. Dimana presiden hannya berfungsi sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Penerapan sistem ketatanegaraan yang seperti ini, membuat ketidakstabilan di pemerintahan.

Tahun 1950 – 1955

Pada 1950 hingga 1955 Pancasila tetap menjadi dasar negara. Pada penerapannya, Pancasila lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Sistem pemerintahan ini lebih menekankan pada hak-hak individu. Hal ini dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tak lagi mengutamakan musyawarah mufakat, melainkan dengan suara terbanyak atau voting.

Pada masa ini, persatuan dan kesatuan banyak mengalami rintangan. Dengan munculnya aksi-aksi pemberontakan, seperti pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia. Sedangkan dalam kehidupan berpolitik, demokrasi berjalan lebih baik setelah adanya

pelaksanaan pemilihan umum 1955 dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis. Tapi disisi lain, keanggotaan konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan terjadinya krisis politik, keamanan dan ekonomi, yang menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante.

Dinamika Pancasila Era Orde Lama

Periode orde lama dimulai di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno berlangsung antara tahun 1959-1966. Pada masa ini, penerapan Pancasila pada bisa dikatakan masih berada pada keadaan kacau karena kondisi sosial budayanya berada dalam suasana peralihan dari rakyat terjajah menjadi rakyat yang merdeka. Pada masa orde lama Pancasila mengalami ideologisasi, yang dapat diartikan bahwa Pancasila sedang berusaha dibangun dan ditanamkan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pengimplementasian Pancasila pada masa orde lama terutama dalam sistem ketatanegaraan belum sepenuhnya diterapkan. Demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat yang dipimpin dengan nilai-nilai Pancasila, melainkan kekuasaan tertinggi berada di tangan Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sehingga dijuluki sebagai masa Demokrasi Terpimpin. Ir. Soekarno menjadikan Pancasila sebagai bagian dari revolusi Indonesia dan melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma USDEK.

Pada saat ini pula, timbul penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibat yang ada Presiden Soekarno menjadi Presiden yang otoriter, yang mengangkat dirinya menjadi Presiden dengan jabatan seumur hidup, bahkan menggabungkan paham nasionalisme, komunis dan agama yang sangat bertolak belakang dengan NKRI.

Artinya, di era orde lama Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata politik dan ideologis. Akibatnya, banyak terjadi pemberontakan akibat singgungan dan perbedaan kepentingan antara Presiden Soekarno, militer, partai komunis, dan kelompok Islam. Puncak kerusuhan terjadi saat meletusnya pemberontakan komunis yang dikenal dengan Gerakan G-30 S/PKI.

Dinamika Pancasila Era Orde Baru

Peristiwa G-30S/PKI mewarnai berakhirnya pemerintahan orde lama. Kondisi Indonesia yang semakin parah dan tak kunjung ada penyelesaian yang berarti dari pemerintah membuat masyarakat menganggap presiden tidak mampu lagi menangani kericuhan akibat pemberontakan partai komunis tersebut. Atas tuntutan rakyat, Presiden Soekarno akhirnya menunjuk Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan melalui Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar). Hal inilah yang menjadi awal berakhirnya pemerintahan orde lama, hingga demokrasi terpimpin resmi berakhir dengan turunnya Ir. Soekarno sebagai presiden digantikan oleh Presiden Soeharto.

Pemerintahan orde baru berupaya menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagai perbaikan dari masa sebelumnya yang dianggap telah

menyimpang dari Pancasila. Pemerintah orde baru dianggap mampu mempertahankan Pancasila setelah berhasil menumpas pergerakan komunis dan menjalankan program P4 (Pedoman dan Penghayatan Pancasila). Namun hal ini tidak berlangsung lama, dalam pelaksanaannya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru menyeleweng dari nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila ditafsirkan demi kepentingan kekuasaan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang sangat merugikan kepentingan rakyat.

Pada masa pemerintahannya Presiden Soeharto juga melarang segala bentuk kritikan terhadap pemerintah karena dianggap mampu mengganggu stabilitas nasional. Hal ini jelas-jelas bentuk pertentangan terhadap nilai kerakyatan dalam sila ke-4 Pancasila, dimana seharusnya pemerintah menjunjung tinggi asas demokrasi. Melalui kebijakan ini, kebebasan rakyat dan media masa sangat dibatasi sehingga rakyat kehilangan peranannya untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Beberapa tindakan lain di era orde baru, yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila antara lain yaitu :

1. Pancasila ditafsirkan secara sepihak melalui program P4 yang dijalankan pemerintah.
2. Marak terjadi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) di kalangan pejabat tinggi negara.
3. Pembatasan pers dan pembentukan Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor agar setiap media yang di muat media tidak ada yang menjatuhkan pemerintah.
4. Diskriminasi terhadap masyarakat non pribumi dan golongan minoritas.
5. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia seperti pembunuhan yang terjadi di Tmor Timur, Aceh, Irian Jaya, dan Tanjung Priok.

Puncak kegagalan era orde lama terjadi pada tahun 1997, dimana terjadi krisis ekonomi dan moneter yang cukup parah. Peristiwa tersebut kemudian memicu aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut turunnya presiden Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun.

Dinamika Pancasila Era Reformasi

Reformasi lahir dengan tujuan untuk menciptakan pembaruan atau sebuah sistem baru yang mampu menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke ranah yang lebih baik.

Berikut beberapa peran Pancasila di Era Reformasi:

- 1) Pancasila berperan sebagai paradigma ketatanegaraan.

Disini pancasila memiliki arti sebagai dasar negara yang berperan besar dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai- nilai yang tercantum dalam teks pancasila harus sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dikutip dari Ekatjahjana tahun 2015 bahwa konsep pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu:

- a. Terjalannya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
- b. Penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir.
- c. Hak-hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, terjalannya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

2) Pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan:

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran dalam aspek pembangunan nasional dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang berfungsi untuk mengembangkan dan membangun sebuah visi dan menjadi referensi kritik terhadap pelaksanaan pembangunan nasional.

Pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan mempunyai berbagai bidang pembangunan, seperti:

- a. Bidang politik: dengan tujuan membentuk sebuah pemerintahan dengan sistem demokratis, dimana didalam pemerintahannya menjunjung kebebasan pendapat, terbuka, adil dan akuntabel.
- b. Bidang ekonomi: menjunjung agar kebijakan ekonomi berjalan secara adil dan ditunjukkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- c. Bidang sosial budaya: Indonesia memiliki keragaman budaya disetiap daerahnya, maka dari itu tujuan dari bidang ini adalah mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.
- d. Bidang hukum: bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pada era reformasi, ancaman terhadap ideologi bukan lagi dalam bentuk pemerintah yang diktator ataupun aksi pemberontakan bersenjata. Fenomena globalisasi menjadi tantangan baru yang kini harus dihadapi. Globalisasi mampu membawa pembaharuan di berbagai sektor sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan teknologi dan cepatnya arus informasi. Segala informasi yang serba cepat dan bebas menjadi ancaman nyata bagi ideologi negara. Kemudahan yang ada membuat paham-paham yang tidak selaras dengan Pancasila seperti komunis, liberalis, atau kapitalis mudah sekali masuk dan tanpa sadar mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat. Apabila masyarakat tidak selektif dalam memilah dan mempercayai informasi yang masuk, maka nilai-nilai luhur Pancasila tentu semakin tergerus seiring perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Sebagai ideologi bangsa Indonesia, perkembangan Pancasila dari masa ke masa diwarnai oleh berbagai peristiwa dan pergolakan. Meskipun di setiap era, pemerintah memiliki niat dan usaha untuk mempertahankan Pancasila dan berupaya untuk mendasarkan setiap kebijakan agar selaras dengan nilai luhur Pancasila, pada realitanya niat tersebut belum mampu dilaksanakan sesuai harapan. Seringkali tindakan yang diambil pemerintah justru meyeleweng dari nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu sendiri.

Pada era awal kemerdekaan, dimana Pancasila baru terbentuk, masih banyak gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya. Kemudian, di bawah pimpinan Presiden Soekarno, usaha ideologisasi Pancasila justru terhambat karena pemerintahan yang bersifat diktator dan adanya ancaman dari ideologi komunis. Di era orde baru, Pancasila dijadikan alat bagi para penguasa untuk kepentingan kekuasaan petinggi negara, hingga presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun. Pada era reformasi hingga sekarang ini penerapan Pancasila dirasa semakin banyak tantangan, derasnya arus globalisasi yang tidak mampu dibendung membuat ancaman yang datang terasa semu dan seringkali tidak disadari.

Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara harus terus dipertahankan karena merupakan satu-satunya ideologi yang paling relevan untuk diterapkan di Indonesia. Buktinya, hingga saat ini butir-butir Pancasila mampu menyatukan dan mengharmoniskan keberagaman yang ada.

Segala dinamika yang telah dilalui Pancasila, semestinya dijadikan bahan penting sebagai pertimbangan untuk menentukan berbagai kebijakan dan strategi dalam rangka menjauhkan Pancasila dari segala hal yang mampu mengancam kedudukannya sebagai ideologi negara. Seluruh masyarakat harus menyadari bahwa memastikan lestariannya nilai-nilai Pancasila bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga pendidikan saja, namun merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, L. & Dewi, A. (2021). *Menyingkap Perkembangan Pengimplementasian Pancasila dari Masa ke Masa. Jurnal of education, psychology and counseling*. 3(1)
- Dewi, S. & Shandy, A. (2018). *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Jurnal PPKn & Hukum*, 13 (1).
- Regiani, E. & Dewi, A. (2021). *Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi, Jurnal Kewarganegaraan*. 5(1)
- Tuniredja, Tukiran & Syahmo. (2020). *Pancasila Dasar Negara Paripurna*. Jakarta: Kencana
- Winarno. 2016. *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Bumi Aksara